



Dr Anom Wahyu Asmorojati SH MH
Dosen Fakultas Hukum UAD /
Sekretaris Prodi Magister Hukum UAD

Pandemi Covid-19 belum selesai, tetapi korupsi semakin menjadi-jadi. Bahkan, ancaman hukuman mati, tidak membuat koruptor jera, melainkan justru semakin merajalela. Hal ini ditandai dengan merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 40 pada tahun 2019. Sebelum munculnya Covid-19 menjadi 37 di tahun 2020 ketika Covid melambung tinggi.

Meskipun pada tahun 2021 IPK naik 1 point menjadi 38 (skala 100), namun upaya Indonesia bersih dari korupsi masih jauh dari harapan. Hingga saat ini negara

Neuro-Anticorruption: Inovasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

paling bersih dari korupsi masih ditempati oleh Denmark, Finlandia dengan IPK 88.

Sedangkan Indonesia masih berada di urutan 96 dari 180 negara. Padahal, Indonesia adalah negara religius yang memiliki 6 agama resmi dan semuanya melarang korupsi. Dalam Islam korupsi merupakan dosa besar bahkan dalam buku Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah dinyatakan sebagai Syirik Akbar.

Perilaku koruptif yang semakin meningkat di tengah pandemi Covid 19 menunjukkan bahwa terpuruknya perekonomian akibat efek pandemi menjadi salah satu pemicu utamanya. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat kondisi masyarakat di masa pandemi Covid 19 secara umum cenderung menurun dibandingkan masa sebelum pandemi. Situasi tersebut

LENTERA

diperparah dengan tertangkapnya beberapa menteri dan wakil menteri dalam kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi menunjukkan bahwa situasi pandemi ini justru menjadi sebuah potensi tersendiri dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya bantuan sosial banyak disalah gunakan.

Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum secara represif semata, namun perlu didukung dengan upaya pencegahan secara preventif. Sejauh ini, upaya pencegahan masih bersifat tambal sulam salah satunya melalui Pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi antikorupsi. Namun, hingga saat ini upaya pencegahan korupsi belum

memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya neurosains (ilmu yang mempelajari tentang otak). Dalam neurosains, otak koruptor hanya normal tetapi tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pencegahan korupsi yang mampu mendeteksi dan membedakan gelombang otak normal dan otak sehat. Alat ini dapat digunakan oleh aparat pemerintah atau penyelenggara negara untuk seleksi pejabat guna memastikan otak sehat tidak sekadar normal. Inilah pencegahan korupsi sejak dini berbasis neurosains.

Dalam hal ini inovasi dari Tim Periset dari Universitas Ahmad Dahlan yang diketuai oleh Dr Suyadi MPd.I dan beranggotakan Anton Yudhana PhD serta saya sendiri merancang rekayasa teknologi pencitraan otak untuk mendeteksi gelombang otak

perilaku koruptif yang disebut dengan istilah, Neuro-Anticorruption. Terdapat enam area otak yang disinyalir meregulasi perilaku koruptif, yakni korteks prefrontal, sistem limbik, ganglia basalis, giruscingulat, lobus temporalis, dan cerebellum (Pasiak, 2012). Alat yang merupakan luaran dari Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Multitahun ini diproyeksikan dapat menangkap sinyal gelombang otak khususnya pada area-area tersebut sehingga dapat diketahui normal atau tidak.

Dalam bidang Hukum Roscou Pound memiliki teori bahwa Hukum merupakan sarana perubahan dalam masyarakat (law as a tool of social engineering). Menurut hemat penulis upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi jauh lebih efektif

dilakukan dibandingkan dengan penanggulangan. Alat ini dapat digunakan menjadi salah satu indikator untuk mengetahui gelombang otak calon pejabat yang akan duduk dalam jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Selama ini, tindakan pencegahan tindak pidana korupsi masih sangat minim dilakukan, mayoritas tindakan yang dilakukan adalah penanggulangan perbuatan tindak pidana korupsi sudah terjadi dan diproses hukum.

Hal tersebut membawa konsekuensi logis adanya stigma negatif dari masyarakat, kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap pejabat publik apabila banyak pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. (*)

BPBD KERAHKAN TRC DAN TIM SAR

Ancaman Gempa dan Tsunami

WONOSARI (KR) - Untuk mengantisipasi gempa bumi dan tsunami di Pantai selatan Pulau Jawa sebagaimana diingatkan Badan Meteorologi Klematologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pinggir pantai selatan Pulau Jawa. Tanggal 26 Juli lalu sosialisasi bersama Yayasan Bintari di Balai Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus. Sosialisasi juga dalam kelompok kecil, para nelayan, pedagang, pencari rumput laut, pemancing dan masyarakat pantai secara luas. Selain itu juga menerjunkan tim reaksi cepat (TRC) dan juga Tim SAR untuk terus komunikasi dengan masyarakat pantai," kata Kepala BPBD Gunungkidul Purwono MSI, Selasa (2/8).

Masyarakat pinggir pantai juga diminta untuk intensif mengikuti infor-



KR-Endar Widodo

Purwono MSI

masi BMKG dari waktu ke waktu agar dapat menyiapkan diri untuk melakukan evakuasi jika terjadi gempa bumi maupun tsunami. Sekarang ini BPBD juga terus melakukan ceking beberapa rambu peringatan, jalur evakuasi, titik kumpul mana kala bencana alam tersebut terjadi. Jadi tidak hanya sosialisasi penyediaan masyarakat, tetapi juga memastikan seluruh rambu, alat pendeteksi gempa dan tsunami dicek

keaktifannya. "Jika ada peringatan dari BMKG alat deteksi gempa dan tsunami dapat berfungsi secara maksimal," ujarnya.

Sementara ini jumlah TRC BPBD yang dikerahkan sebanyak 24 dan akan terus melakukan koordinasi, menginformasikan dan juga mengecek sekresi penyelamatan jika terjadi bencana gempa bumi, tsunami dan gelombang tinggi. TRC akan bau membuat dengan Tim Search and rescue (SAR) Pantai Selatan Gunungkidul yang markasunya terbagi menjadi dua di Baron, Kemadang, Tangjursari dan Pantai Sabo, Kapanewon Girisubo. Jumlahnya ada 100 orang, terbagi dua tempat. "Sehubungan dengan ancaman gempa BPBD juga melakukan ceking atas sarana dan prasarana TIM SAR," tambahnya. (Ewi)

BANTUAN PENINGKATAN TERUS DIUPAYAKAN

Ribuan Warga Tinggal di RTLH

WONOSARI (KR) - Ribuan warga Kabupaten Gunungkidul masih tinggal di Rumah kategori Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) saat ini masih terdapat ribuan rumah tidak layak huni.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto mengatakan puluhan ribu rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul. "Pendataan telah dilakukan dan hasilnya dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan program perbaikan rumah," katanya Selasa (2/9).

Untuk tahun 2022 anggaran ini, pemerintah pusat, daerah dan kabupaten menargetkan seribu lebih rumah yang tersasar bantuan. Dijelaskan bahwa untuk mengentaskan permasalahan ini, pemerintah

sudah menggelontor anggaran untuk program bantuan perbaikan RTLH yang tentunya tidak hanya menggunakan dana dari pemerintah kabupaten tetapi juga pemerintah DIY dan pusat. Tahun ini, APBD Gunungkidul hanya mampu meng-cover 400 unit perbaikan RTLH dengan besaran masing-masing Rp 17,5 juta. Sedangkan anggaran dari Pemda DIY menasar 143 unit dengan besaran stimulan Rp. 17,5 juta, Dana Alokasi Khusus (DAK) menasar 30 unit dengan anggaran Rp. 35 juta per rumah. Sedangkan dana Keistimewaan menasar pro-

gram bantuan perbaikan rumah sebanyak 20 unit masing-masing unit mendapatkan Rp. 50 juta," ujarnya.

Dari BSPS Pusat juga mengalokasikan dana untuk 63 unit rumah dengan besaran masing-masing Rp. 20 juta.

Tidak hanya itu, rencananya Gunungkidul juga akan mendapatkan tambahan dari pemerintah provinsi sebanyak 600 unit yang masih dalam tahap verifikasi dan validasi.

Sedangkan yang lain sudah mulai suplai barang ke titik-titik yang tersasar bantuan. Dengan masih banyaknya rumah dalam kategori tersebut tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun hal ini tentunya kembali lagi kepada anggaran yang dimiliki pemerintah serta bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi mau-

pun Pusat. Sebab jika hanya Pemkab Gunungkidul tidak mampu menasar seluruhnya.

"Adapun kapan terselesaikan seluruhnya tentu akan menyesuaikan dengan prioritas pemerintah karena berhubungan dengan alokasi anggaran yang dikelola," ucapnya.

Kepala Dinas PUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan, RTLH memang menjadi perhatian pemerintah yang harus diselesaikan dan di Kabupaten Gunungkidul pemerintah terus berupaya mengusulkan bantuan program perbaikan ini baik menggunakan anggaran APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN. Untuk tahun ini alokasi bantuan mencapai seribu lebih, harapannya bantuan ini bisa tepat sasaran dan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh penerima. (Bmp)

KOLABORASI PSA-SMK MAHISA AGNI

Siapkan Tenaga Profesional ke Jepang

WONOSARI (KR) - Lembaga Pelatihan kerja dan Sending Organization, Pusa Setya Abadi (PSA) menjalin kolaborasi dengan SMK Mahisa Agni Gunungkidul. PSA memiliki kemampuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program magang ke Jepang. Sekaligus menjadi langkah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat DIY.

"Beberapa program yang dijalankan PSA di antaranya Internship, magang kerja 1 tahun dan 2 tahun. Selain itu kelas persiapan ujian kompetensi keahlian dan kelas persiapan ujian kemampuan Bahasa Jepang," kata Direktur PSA Anggun Resti SE dalam keterangan persnya di SMK Mahisa Agni, Selasa (2/8). Sekaligus melepas 4 perwakilan calon peserta magang ke Jepang yang diberangkatkan (5/8). Bersamaan dilaksanakan komunikasi via zoom Glow Ageing perusahaan yang membawahi panti lansia dan rumah sakit di Jepang.



KR-Dedy EW

4 calon peserta magang siap berangkat ke Jepang.

Kegiatan dihadiri Kepala SMK Mahisa Agni Alexander Muryadi, serta Direktur DAN Japan Daniswara. Diungkapkan, PSA telah menjalin kerjasama dengan pihak DAN Group Japan yang berkantor pusat di Hiroshima Jepang. Untuk memperluas jaringan perusahaan penerima di berbagai bidang program magang. Salah satu perusahaan penerima dari DAN Group Japan yakni Glow Ageing Co Ltd dimana PSA akan mendapatkan dukungan permintaan perawatan lansia yang berjumlah 1000 perawat dalam waktu 5 tahun. " Untuk

memenuhi permintaan perawatan lansia, PSA berkolaborasi dengan SMK Mahisa Agni Gunungkidul. Sebagai sekolah menengah kejuruan perawat sosial. Sehingga mempersiapkan lulusan profesional sesuai standar kualifikasi calon peserta magang perawat lansia ke Jepang," imbuhnya.

Ditambahkan, empat peserta magang akan ditempatkan di rumah sakit lansia di Prefectur Fukuoka sebagai perawat lansia. PSA juga membuka kesempatan bidang lain diantaranya kontruksi, pertanian, pengolahan hasil perikanan dan sebagainya. (Ded).

PELATIHAN - PENYULUHAN ANTIKORUPSI

Desa Pelopor Pencegahan Korupsi Massif

SENTOLO (KR) - Desa berintegritas menjadi salah satu gerakan yang bertujuan untuk menjadikan desa sebagai pelopor pencegahan korupsi secara massif dalam menekan angka kasus korupsi di Indonesia.

Kalurahan Banguncipto yang merupakan Desa Mitra Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mempunyai peluang yang besar dalam mewujudkan Kalurahan Banguncipto yang berintegritas. Dasar Hukum desa berintegritas adalah UUD NRI 1945, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Program Kemitraan Masyarakat Dr Anom Wahyu Asmorojati SH MH dalam Pelatihan dan Penyuluhan Antikorupsi Me-

nuju Desa Berintegritas di Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kulonprogo, Selasa (2/8). Kegiatan dibuka oleh Lurah Banguncipto, Boiran SPd SH MA dengan narasumber ketuai oleh Dr Anom Wahyu Asmorojati SH MH dan Anggota dari penyuluh Antikorupsi KPK RI yaitu Dr Suyadi MPdI dan Suyitno MPd.

Sedangkan Dr Suyadi MPdI menyampaikan materi di hadapan para peserta, desa berintegritas penting karena pemerintahan desa penyumbang kasus korupsi anggaran dana terbesar kedua sejak tahun 2020 dan 2021. "Maka perlu menciptakan penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama,



KR-Istimewa

Dr Anom Asmorojati MH didampingi Dr Suyadi MPdI dan Suyitno MPd menyerahkan cenderamata buku dalam Pelatihan dan Penyuluhan Antikorupsi.

tokoh pemuda, kaum perempuan," ujarnya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Suyitno MPd. KPK tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya pencegahan korupsi, maka perlu dukungan oleh masyarakat.

Sementara itu, Boiran SPd SH MA memgajak

bersama-sama untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel menuju desa yang berintegritas.

"Kami berharap perlu adanya pendampingan pembangunan yang bersifat partisipatif masyarakat melalui program yang telah dicanangkan," tuturnya. (Wid).

TETAP PENCEGAHAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Belum Ada Monkeypox, Harus Waspada

WATES (KR) - Meski di Indonesia belum ada laporan terkait penyakit monkeypox (cacar monyet), tetapi tetap harus waspada dan kewaspadaan ini harus disampaikan ke masyarakat. Pencegahan tetap Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), bila ada kasus bergejala yang mengarah dan terutama riwayat kontak, langsung dipikirkan ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan (faskes).

Disampaikan dr Rina Nuryati Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kulonprogo, penyakit ini merupakan penyakit yang dulu pernah ada ditularkan oleh binatang kepada manusia, yang disebabkan oleh virus.



KR-Widiastuti

Rina Nuryati.

Mulai munculnya lagi di awal tahun 2022 ini di negara-negara Amerika dan Eropa.

"Sampai 26 Juli 2022 sudah ada 75 negara yang melaporkan dan Indonesia masuk kategori 1 atau tidak/belum ada kasus, tetapi Singapura sudah melaporkan kasusnya. Otomatis

ini menjadikan kewaspadaan kita terutama nanti bagi pelaku perjalanan dari luar negeri," ujar Rina, Selasa (2/8).

Kewaspadaan di pintu masuk negara, orang yang habis dari perjalanan kontak dengan gejala monkeypox, maka harus dilakukan pelacakan lebih lanjut. "Untuk gejala penyakit hampir mirip dengan cacar air atau cacar. Namun sekarang cacar sudah tidak ada. Perbedaan ada nyeri di getah bening jadi itu tanda khasnya, selain muncul ruam-ruam dan lesi kulit. Nyeri di getah bening bisa terjadi di leher selangkangan, ketiak tergantung lokasi mana yang banyak muncul," urai Rina.

Pengobatan sebenarnya

ada anti virus, namun Indonesia belum punya. Sebenarnya ini penyakit karena virus, sembuh sendiri, tetapi kalau sakit mengganggu produktivitas. Jadi tetap harus ditangani. Pemeriksaannya seperti penyakit lainnya, ada kategorinya yakni suspek, probable, dan konfirmasi.

"Nanti ada klasifikasi tersendiri dan pemeriksaan lab memakai PCR. Di Indonesia bila suspek bergejala bisa dikirim ke dua lab yang ditunjuk yakni di Lab Penelitian Penyakit Infeksi di Prof Sri Umiyati Jakarta dan Pusat Studi Satwa Primata IPB," kata Rina sembari menyatakan, penularan bisa dari binatang ke manusia atau manusia ke manusia. (Wid)

Dilantik, Pengurus Badko TKA TPA Kulonprogo

WATES (KR) - Pengurus baru Badan Koordinasi Taman Kanak-kanak Alquran dan Taman Pendidikan Alquran (Badko TKA TPA) Kabupaten Kulonprogo diharapkan mampu melaksanakan program dan kegiatan secara optimal, sehingga memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

"Selamat kepada pengurus baru dan semoga betul-betul bisa mengemban amanah," kata Pj Bupati setempat Drs Tri Saktiyana dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Drs Jazil Ambar Wasian saat pelantikan Pengurus Badko TKA TPA Kulonprogo masa bakti 2021-2025 di Aula Adikarta Kompleks Pemkab Kulonprogo, baru-baru ini.

Nampak hadir pada pelantikan Wakil

Ketua I DPRD Kulonprogo Ponimin SE, Kepala Kantor Kementerian Agama Wahib Jamil SAG dan Forkompimda.

Sementara itu Ketua Badko TKA TPA DIY, Muh Sonef MHI usai melantik Pengurus Badko TKA TPA Kulonprogo, berharap jajaran pengurus di tingkat kabupaten senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar maksimal dalam menjalankan gerakan dakwahnya.

Kepengurusan Badko Kulonprogo masa bakti 2021-2025, Ketua Umum Burhani Arwin dan Sekretaris Umum Agus Wantoro SH, kepengurusan dilengkapi 6 bidang dengan total pengurus 52 orang ditambah tujuh orang Dewan Pertimbangan dan delapan orang Dewan Pakar. (Rul)